

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

**POSISI PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM**

Makalah

**Dipresentasikan Pada Seminar Staf Pengajar MKU
Universitas Negeri Padang
Tanggal 14 Mei 2005**



OLEH :

DRA. ZAINURNI ZEIN M.AG
NIP. 130 613 087

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	13-11-2007
SUMBER HARGA :	40
KOLEKSI :	K1
NO. INVENTARIS :	269/40/2007-P2(A)
KLASIFIKASI :	297 Zei P.2

Islam

**UPT MKU FAKULTAS ILMU - ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP)
Tahun 2005**

POSISI PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PEMBINAAN REMAJA ISLAM

A. Pendahuluan

Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA dan Perguruan Tinggi, merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dituangkan dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 bahwa :

1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.
3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan berbentuk lain yang sejenisnya.
5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹

¹ Depdiknas, *Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : 2004.

Mencermati ketentuan tersebut di atas, terlihat bagaimana pendidikan agama Islam berada pada posisi strategis, bila dibanding dengan materi pendidikan lainnya. Orientasi pelaksanaannya bukan hanya pada pengembangan *Intelegensi Qoutient (IQ)*, akan tetapi lebih dari itu juga mengembangkan *Emasional Qoutient (EQ)* dan *sprituial Qoutient (SQ)* secara harmonis dan bersinegi. Hal ini terlihat dari amanat pasal 13 ayat 1 huruf a UUSPN tahun 2003, yaitu : Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama “ Dengan mengacu pada pesan edukasi yang diharapkan agar pendidikan mampu melahirkan *out put* yang beriman dan bertaqwa (sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya).

Memperhatikan landasan pelaksanaan pendidikan agama yang telah mempunyai legitimasi di Negara Republik Indonesia, maka semenjak kedatangannya di Indonesia, Islam telah menggunakan pendidikan dan dakwah sebagai sarana untuk mensosialisasikan ketengah-tengah masyarakat. Proses sosialisasi Islam melalui pendidikan tersebut, selain dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga dilakukan oleh pemerintah atau sekurang-kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah yang pada akhirnya terjadi proses saling kerjasama antara lembaga pendidikan keagamaan dengan pemerintah.

Dewasa ini, banyak kritikan yang ditujukan pada keberadaan pendidikan Islam yang masih dianggap belum memberikan hasil yang menggembirakan karena berbagai faktor. Namun kompleksitas permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam, selain dikarenakan faktor internal umat Islam itu sendiri, juga

diperparah lagi oleh politik pendidikan di Indonesia yang belum memberikan tempat yang proporsional pada pendidikan Islam itu. Kenyataan tersebut antara lain terlihat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut pendidikan nasional yang belum memposisikan pendidikan Islam sebagai bagian integral dan bersinergi dengan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.²

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka ada dua sistem pendidikan yang mestinya seiring dan sejalan, yaitu pendidikan nasional dan pendidikan Islam yang seharusnya disinergikan, bukanlah dipertentangkan secara dikhotomis. Secara faktual harus diakui, bahwa, tujuan mulia itu belumlah mampu diaplikasikan secara baik, sementara kemajuan suatu bangsa tergantung kepadanya, dan pelayanan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dipikul oleh pemerintah dan negara. Makanya peranan negara dalam hal tersebut sangatlah mutlak, sementara pihak lain hanyalah bersifat membantu dan mendorong dalam pelaksanaannya.

²Ibid

B. Potret Keberadaan Pendidikan Islam Dewasa ini.

Dalam konteks pendidikan Islam, maka pendidikan itu lebih dikenal dengan istilah “ *tarbiyah, ta’lim, riyadhah* dan *ta’dhib* “. Masing-masing istilah tersebut tentu mempunyai pengertian yang berbeda, karena perbedaan kata dan konteks kalimatnya, namun dalam hal tertentu istilah-istilah itu berbeda, tetapi makna dan maksudnya mempunyai kesamaan. Walaupun pengertian pendidikan Islam diekspresikan dalam berbagai peristilahan, namun semuanya tetap berorientasi dan sasarannya adalah pada pembinaan manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, trampil dan unggul atau yang disebut dengan istilah “ *Manusia Yang Berkualitas* “ (*Insan al-Kamil*).

Untuk itu, maka dapat diformulasi hakekat pendidikan Islam tentulah tidak boleh dilepaskan begitu saja dari sumber ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, karena kedua sumber tersebut merupakan pedoman dan acuan yang jelas dalam penggalian khazanah keilmuan yang heraneka ragam serta pengembangan peradaban dan budaya Islam itu sendiri. Dengan menjadikan kedua sumber tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran yang kongkrit dan jelas tentang hakekat pendidikan Islam.³

Mencermati beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa hakekat pendidikan Islam itu meliputi lima prinsip pokok yaitu:

1. *Proses transformasi dan internalisasi yaitu upaya pendidikan Islam yang dilakukan secara bertahap, berjenjang dan kontinyu dengan upaya pemindahan, penanaman, pengarahan, pengajaran, pembimbingan yang*

³ Arifin HM, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta; Bumi Aksara, 199, h.3-4

dilakukan secara terencana, sistematis dan terstruktur dengan menggunakan pola dan sistem terpadu.

2. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, yaitu upaya yang diarahkan kepada pemberian dan penghayatan serta pengamalan ilmu pengetahuan, norma dan nilai-nilai yang berkembang ditengah masyarakat.
3. Dari pihak peserta didik, yaitu bagaimana pendidikan yang diberikan kepada anak didik memungkinkan mereka pada akhirnya dapat dan mampu menerapkan dan mempunyai sifat – sifat terpuji dan berbudi pekerti luhur (*al- akhlak al-karimah*).
4. Melalui penumbuhan dan pengembangan potensi diri sesuai dengan fitrahnya, yaitu tugas pendidikan Islam menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan menjaga potensi manusia agar ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan, minat dan bakat yang ada padanya. Tentunya hal ini, akan dapat menjadikan anak didik berpotensi untuk kreativitas dan produktivitas.
5. Guna mempunyai keselarasan, keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, dengan terbentuknya manusia yang berkualitas (*al-insan al-kamil*), yaitu manusia yang dapat menjadikan, menyelaraskan kebutuhan hidup antara jasmani dan rohani, fisik dan mental dan menciptakan bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ungkapan lain mendeskripsikan bahwa pendidikan Islam hendaklah menyentuh totalitas segala aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dan mental, jasmani dan

rohani yang terdiri dari unsur, otak, indera, *qalb* (hati) dan prilakunya, sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.⁴

Dengan memperhatikan hakekat pendidikan Islam tersebut di atas, sekurang-kurangnya ada empat sasaran dan tujuan pendidikan Islam yang harus ditemukan dalam penyelenggaraanya yaitu :

- a. Tujuan pendidikan rohani, adalah menghidupkan jiwa tauhid dan meningkatkan kualitas keimanan hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw, dengan berdasarkan cita-cita ideal dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b. Tujuan pendidikan akal, adalah pengembangan intelegensi dan ilmu pengetahuan untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan menelaah tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Dan menemukan ayat-ayat-Nya yang membawa manusia untuk beriman kepada Allah pencipta alam semesta.
- c. Tujuan pendidikan sosial, adalah pembentukan kepribadian yang utuh dimulai dari roh, tubuh dan akal dalam berinteraksi dengan masyarakat dan juga untuk masyarakat itu sendiri, dalam rangka memaksimalkan penebaran kebaikan dan pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat secara umum (amal saleh).
- d. Tujuan pendidikan jasmani adalah mempersiapkan setiap individu sebagai manusia pengemban amanah dan tugas sebagai khalifah di muka bumi, dengan memelihara kesehatan dan merawat tubuh serta

⁴Muhaimin, DKK, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung, Higenda Karya, 1993, h.136

meningkatkan keterampilan fisik,⁵ sehingga menimbulkan kelincahan dan keleluasaan dalam menjalankan kreativitasnya tersebut.

Bila ditinjau dari perspektif pendidikan Islam, maka ada persoalan yang mendasar yang harus segera di cermati serta di atasi dalam pendidikan nasional, yaitu adanya dualisme sistem pendidikan, yang pada gilirannya menghasilkan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum.⁶ Sekalipun di negara-negara Muslim corak pendidikan Islam pada umumnya berbenturan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan yang dipandang sangat krusial adalah kenyataan bahwa eksistensi pendidikan Islam sebagai suatu sistem di negara-negara Muslim pada umumnya hanya berada dalam lingkup yang terbatas yaitu sebagai sub-sistem dari sistem yang berlaku secara umum masih dalam posisi mendua antara orientasi tradisional dan modern.⁷

Begitu juga aspek lain yang perlu dikritisi dari sistem pendidikan nasional, baik jalur pendidikan agama Islam dan pendidikan ilmu-ilmu umum, kenyataan bahwa pendidikan itu masih terlalu menekankan pada pelatihan ketimbang pendidikan, mementingkan materi dari metodologi, mementingkan produk final ketimbang proses, mengutamakan pemikiran kreatif dari pada ketimbang proaktif.

⁵Abdurrahman Saleh Abdullah, *Educational Theory, Quranic Out Look*, Mekkah; Ummul Qura University, 1982, h.1

⁶Mudjia Rahadjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Ilmu Pengetahuan*, Malang, Cendekia Paramulya, 2000, h.54.

⁷Syed Sajjad Husein & Syed Ali Ashraf, *Crisis in Moslem Education*, Jeddah; King Abdul Aziz University, 1979, h.51

Pendidikan Islam sebagai sub-sistem dari pendidikan nasional, maka pendidikan Islam lebih sering diidentikkan dengan bentuk akomodasi aspek religuitas dalam keseluruhan proses pelaksanaan sistem pendidikan.⁸ Sedangkan aspek religuitas tersebut merupakan bagian dari lima aspek dasar individu dari tinjauan antropo filsafat, yaitu historis, materialitas, sosialitas, etis dan religuitas itu sendiri yang seyogianya diakomodasikan dalam sistem pendidikan.

Dari sisi lain, bahwa pendidikan Islam terbatas pada pengertian, sebagai pendidikan agama. Dalam hal ini, permasalahan dualisme sistem pendidikan inilah yang menjadi sumber konflik antara orang-orang yang berfikir sekuler dan kelompok yang berorientasi pada pemikiran keagamaan.⁹

Dasar filsafat pendidikan Islam dalam suatu negara, sudah barang tentu disusun bersendikan pandangan hidup yang dianutnya. Sebagaimana halnya dengan bangsa Indonesia, dimana dasar dan filsafat pendidikannya disusun berdasarkan Pancasila, sehingga pandangan filsafat tertentu termasuk filsafat pendidikan Islam dapat diterima selama tidak bertentangan dengan filsafat Pancasila.¹⁰

Munculnya dualisme pendidikan disebabkan karena sumber nilainya berbeda, dimana pendidikan agama Islam jelas secara nyata berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sedangkan sistem pendidikan nasional bersumber pada pandangan hidup tertentu yang dianut oleh bangsa itu sendiri. Namun, dari sisi esensi cita-cita yang diembanya tidaklah terdapat unsur-unsur kontradiksi antara keduanya.

⁸Imam Barnadib, *Dasarr Filsafat Sistem Pendidikan Nasional dalam Pemikiran tentang Pendidikan Baru*, Jogyakarta; Andi Offset, 1985, h. 144-145

⁹Ali Ashraf, *Harison Baru Pendidikan Islam*, terj. Sori Siregar, Jakarta; Pustaka Firdaus, 1989, h. 89

¹⁰Imam Barnadib, *op.cit.*, h. 147

Adapun posisi pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional sebenarnya merupakan konsekwensi logis dari keberadaan Islam sebagai bagian dari kemajemukan agama yang diakui dalam suatu negara. Tentunya dalam perspektif tertentu mengindikasikan bahwa aspek universal Islam tidak menjadi pudar dalam ruang dan waktu yang khas.

Untuk melihat problematika ini, ada dua hal yang perlu dikaji bersama mengenai pendidikan Islam di Indonesia sebagai suatu sistem, yaitu (1) Mengenai hubungannya dengan keseluruhan sistem pendidikan di Indonesia, dan (2) Mengenai struktur internal yang terdapat dalam tubuh pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini.¹¹

1. Hubungan Pendidikan Islam dengan Pendidikan Umum

Hubungan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan umum Indonesia, yang perlu dipahami adalah korelasi dengan keseluruhan sistem pendidikan yang menyelenggarakan program-program pendidikan umum. Berdasarkan kesan sementara, terdapat kesan bahwa pada umumnya hubungan ini kurang akrab, di mana pendidikan Islam di Indonesia masih merupakan suatu dunia sendiri. Ia berdiri sendiri, mempunyai tujuan-tujuan sendiri dan tidak selalu tanggap terhadap perkembangan pendidikan yang terjadi diluar dirinya. Ini tentu saja tanpa menafikan bahwa dalam kasus tertentu, tentu juga ada lembaga – lembaga pendidikan Islam yang cukup akrab hubungannya dengan lembaga-lembaga pendidikan umum.

¹¹Mochtar Bukhori, *Spektrum Problema Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, h. 124

Kenyataan di atas menggambarkan dua hal. *Pertama*, bahwa dinamika yang terdapat di dunia pendidikan Islam tidak dapat menular ke dunia pendidikan umum di luar Islam. Contoh yang sangat jelas dalam hal itu ialah, dinamika yang dimiliki oleh pendidikan Islam dalam mengembangkan sistem pendidikan non formal tidak dapat menular kependidikan non formal di luar Islam. *Kedua*, bahwa program yang hidup dalam dunia pendidikan Islam kadang-kadang menjadi terlalu khas dalam arti tidak ada keinginan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan progresif yang terjadi diluar lingkungan pendidikan Islam. Salah satu bukti mengenai hal ini meskipun tidak dapat dipandang sebagai contoh yang final, ialah kenyataan bahwa setiap kali ada murid-murid dari suatu lembaga pendidikan Islam yang turut serta dalam lomba cerdas cermat atau lomba cepat tepat di TVRI, maka biasanya kelompok ini mendapatkan nilai terendah. Bukti kedua ialah bahwa, partisipasi siswa-siswi dari dunia pendidikan Islam dalam kegiatan nasional seperti lomba karya ilmiah remaja masih terlihat rendah dan kurang mendapatkan menjadi juara.

Memperhatikan kesan-kesan tersebut, maka posisi dunia pendidikan Islam di Indonesia dalam konteks problematika pendidikan nasional bersifat ambivalen dalam soal peremajaan sistem pendidikan formal, pendidikan Islam di Indonesia merupakan semacam "beban" yang harus di angkat oleh induknya, yaitu sistem pendidikan nasional pada umumnya. Sedangkan dalam soal pengembangan sistem pendidikan non formal ia menjadi semacam "pelopor" yang tak mudah diikuti. Pemupukan serta pengembangan hubungan fungsional antara dunia pendidikan Islam pada satu pihak dengan pendidikan umum di luar Islam pada pihak yang

lain, diharapkan akan dapat memperbaiki posisi pendidikan Islam di Indonesia mampu bertindak sebagai penyumbang yang berarti bagi penyelesaian problematika pendidikan nasional sendiri.

2. Pendidikan Islam di Indonesia dilihat dari Struktur Internal.

Bila dilihat dari segi program serta praktek pendidikan yang dilaksanakan, lembaga pendidikan Islam yang ada pada saat ini dapat di bagi 4 jenis, yaitu :

- a. Pendidikan pondok pesantren.
- b. Pendidikan Madrasah.
- c. Pendidikan umum yang bernafaskan Islam.
- d. Pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah.¹²

Bilamana keempat jenis lembaga pendidikan Islam di atas, dihubungkan dengan kedua persoalan pendidikan nasional yang telah penulis sebutkan tadi (peremajaan sistem pendidikan formal dan pengembangan sistem pendidikan non formal), maka penulis melihat bahwa pendidikan Islam jenis pondok pesantren merupakan suatu model milik umat Islam Indonesia yang dapat diandalkan untuk memelopori kegiatan pengembangan sistem pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan Islam di madrasah-madrasah serta lembaga-lembaga pendidikan umum yang bernafaskan Islam merupakan wahana yang dapat dipergunakan oleh umat Islam Indonesia untuk turut mendorong lahirnya proses peremajaan sistem pendidikan formal dalam masyarakat Indonesia.

Pendidikan Islam jenis keempat, yaitu pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah umum merupakan suatu kegiatan dengan posisi yang bersifat

¹²*Ibid*,

komplementer dalam pencatatan problematika pendidikan nasional. Artinya adalah tidak banyak yang dapat dilakukan oleh para pendidik Islam lewat kegiatan pendidikan jenis ini untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi lahirnya proses peremajaan sistem pendidikan formal, maupun proses pengembangan sistem pendidikan non formal.

C. Posisi Pemerintah dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹³

Sedangkan sistem pendidikan nasional sendiri meskipun potensinya mencakup seluruh segi kehidupan, namun apabila dicermati lebih lanjut, dalam realisasinya lebih terfokus pada pendidikan formal atau persekolahan. Hal ini dapat dilihat pada undang-undang yang ada, contoh pada UU Nomor 2 tahun 1989. Dalam UU tersebut peran sekolah terlihat sangat menonjol, sehingga pendidikan lebih didekatkan maknanya pada persekolahan.

Gambaran tersebut tentunya tidaklah sejalan dengan kenyataan yang ada. Sebab, selain pendidikan formal di sekolah, lembaga pendidikan swasta saat ini banyak yang muncul dan dapat ditemukan di mana-mana. Munculnya lembaga-lembaga pendidikan swasta, baik dalam bentuk sekolah ataupun lembaga kursus, pelatihan dan sebagainya, harus dianggap sebagai hal yang penting dari pihak-pihak

¹³UU Nomor 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdikbud, 1992

yang ikut mempunyai peran dan kontribusi dalam menyediakan pelayanan pendidikan untuk masyarakat.

Seiring dengan itu, sebagaimana sudah diinsyafi oleh banyak kalangan, bahwa dominannya pendidikan sesungguhnya memang tidak hanya terbatas di sekolah. Pendidikan luar sekolah, baik itu di keluarga maupun lingkungan masyarakat yang luas juga mempunyai tempat tersendiri. Dalam konteks banyaknya lembaga dan dominan pendidikan yang ada tersebut, memang peran terbesar negara atau pemerintah adalah dalam penyelenggaraan pendidikan formal di sekolah, baik di tingkat yang paling dasar sampai ke perguruan tinggi. Namun tentunya hal ini, tidak harus menghalangi pemerintah untuk ikut membantu terselenggaranya pendidikan non sekolah, terutama dari segi pendanaan dan pemberian otoritas terhadap pengembangan masing-masing lembaga, sehingga ia dapat memacu diri sesuai dengan ciri-ciri atau kekhasan lembaganya masing-masing.

Bila dicermati komitmen dan peran pemerintah dalam bidang pendidikan bisa dilihat dalam pola umum pelita di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan antara lain sebagai berikut, bahwa kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan. Dengan demikian meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok maupun kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum. Diupayakan selalu terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan

keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang dimaksudkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan di perguruan tinggi.¹⁴

Di satu sisi memang dapat di akui kebenarannya, bahwa dalam negara berfalsafahkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan tahap pelita demi pelita dan pembangunan jangka panjang zaman pemerintahan Orde Baru, maupun hingga sampai kini telah dirumuskannya undang-undang sistem pendidikan nasional, baik UUSP Nomor 2 tahun 1989 dan disempurnakan melalui UUSP Nomor 20 tahun 2003.

Bila dianalisa secara mendalam, muatan kebijakan pendidikan yang dirumuskan dalam sistem pendidikan nasional, secara teoritis merupakan sistem pendidikan yang cukup ideal bagi proses penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi, bila ditinjau pada tataran operasional, eksisnya masih perlu di analisa kembali, terutama terhadap sejauh mana keberadaan sistem tersebut mampu menghasilkan *out put* yang berkualitas, baik kualitas intelektual maupun kualitas akhlak ataupun moral yang mewarnai kehidupan masyarakatnya.

Untuk melihat fenomena di atas, diperlukan tolak ukur atau kriteria tertentu, guna menilai sejauh mana operasionalisasi pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, telah mampu melahirkan dan mencetak sumber daya manusia seutuhnya yang berkualitas. Dalam hal ini ada dua indikasi fenomena pendidikan tersebut yaitu :

¹⁴Zuhairini DKK, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992, h.157

1. Pendekatan efektifitas

Dalam pendekatan ini, yang menjadi perhatian dan perlu dikembangkan adalah prestasi peserta didik, pendekatan yang dilakukan adalah segi kemampuan peserta didik dalam merespon setiap kegiatan interaksi proses belajar mengajar. Secara sederhana, kreativitas tersebut dapat dilihat dari angka atau nilai yang diperolehnya. Di sisi lain, dapat juga ditinjau apakah ada korelasi antara prestasi akademik dengan kemampuan operasional peserta didik, setelah mereka menyelesaikan studinya, baik untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, maupun kemampuan (*skill*) mereka dengan dan untuk memasuki lapangan pekerjaan (*link and match*)

Begitu juga dimensi proses pendidikan, pada dimensi ini dapat dilihat bagaimana kompetensi profesional yang dimiliki pendidik dalam meng *expose* seluruh potensi peserta didik dan peran aktif *sosio kultural*, maupun kebijaksanaan pemerintah yang kondusif bagi optimalisasi pelaksanaan proses pendidikan.¹⁵

Keberadaan *sosio kultural* suatu bangsa, dalam bentuk yang hidup merupakan suatu kesatuan yang memiliki bagian-bagian yang saling terjalin antara satu dengan lain dan diikat oleh ikatan-ikatan internal yang merupakan pencerminan moral, cita rasa dan nilai sejarah suatu bangsa. Begitu juga di lain sisi, bahwa dimensi moralitas religius yang tertanam dan menjadi pilar dalam kepribadian peserta didik. Nilai ini akan memberikan warna dan corak *individual control* pada seluruh aktivitas kehidupannya.¹⁶

¹⁵John S.Brubacher, *Modern Philosophies of Education* (New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.,1950),h.127-128.

¹⁶M.S Khan, *Humanisme and Islamic Education*, dalam Muslim, Vol IV,No.3, Spring, 1987,h.26-27

2. Pendekatan Efisiensi

Pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pendidikan dapat mengantarkan peserta didik pada tujuan yang diinginkan secara optimal. Upaya ini dapat dilihat dari sejauhmana seluruh unsur yang ada dalam sistem pendidikan mampu menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien atau semaksimal mungkin. Di antaranya adalah kemampuan mengembangkan fasilitas tradisional secara profesional, sehingga keberadaanya mampu bernilai efisien dan juga kemampuan mempergunakan fasilitas modern, sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menunjang proses pendidikannya. Tentunya diharapkan pendidik dapat memperkenalkan berbagai fasilitas modern kepada peserta didiknya secara dialogis dan profesional.

D. Membentuk Generasi yang Cerdas Perspektif Pendidikan Islam

Manakala di telaah *out put* dari sistem pendidikan nasional saat sekarang, maka di samping berbagai keberhasilan yang sudah dicapai, namun juga berbagai fenomena yang menyisakan ironi masih banyak dijumpai. Seperti yang sudah umum diketahui bahwa dalam beberapa kali survey yang dilakukan lembaga riset internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada dalam posisi ranking terendah, bila dibanding dengan negara-negara lain. Disamping itu juga pada saat yang bersamaan, di depan mata dengan mudah terlihat bagaimana generasi muda saat ini banyak yang bermental egois, materialis, konsumtif, hedonis, dan cenderung berfikir sekuler, memandang agama dengan sebelah mata.

Kenyataan ini harus dijadikan pijakan keprihatinan untuk melakukan kritik pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal ini semata-mata karena para remaja sangatlah penting bagi suatu bangsa, baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. Tetapi yang lebih penting lagi ialah kesanggupan pemerintah memberdayakan segala potensi yang besar ini untuk pembangunan dan kelanjutan hidup masyarakat. Peran institusi-institusi sosial, terutama institusi pendidikan untuk mengembangkan aspek moral dan intelektual para remaja dan generasi muda sangatlah diperlukan bagi pencerahan masa depan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah bagaimana mempersiapkan generasi muda dan remaja yang berkualitas dengan ditandai kuat, kokoh keimanannya dan tinggi ketaqwaannya, cerdas dan berketerampilan dalam kehidupannya, sehingga mereka mempunyai kemampuan dikemudian hari untuk menjawab segenap tantangan yang dihadapi secara ulet dan tangguh. Kelanjutan serta peningkatan mutu eksistensi bangsa dikemudian hari akan bergantung kepada kemampuan yang dimiliki generasi muda ini. Kalau mereka mampu menjawab tantangan dan persoalan-persoalan yang berskala nasional ataupun internasional dengan cara yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada cara-cara yang ditempuh para pemegang kekuasaan hari ini, tentulah masa depan bangsa dan negara akan lebih baik dan bermartabat. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa kelangsungan serta peningkatan mutu eksistensi bangsa dan negara Indonesia kedepan, akan banyak ditentukan oleh kemampuan pemegang otoritas hari ini untuk melahirkan perbaikan generasi.¹⁷

¹⁷Mochtar Bukhori, *op.cit*, h. 228

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Bila di telusuri secara seksama, paling tidak, ada beberapa penyebab gagalnya dunia pendidikan dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berkualitas, antara lain adalah :

1. Selama ini pendidikan dalam prakteknya hanya berbentuk pengajaran.
2. Pendidikan moral hanya dijadikan pengajaran yang tidak menentukan dalam penentuan peringkat siswa.
3. Ada beberapa kasus dalam lembaga/ sekolah tertentu bahwa pendidikan dikomersilkan
4. Pemerintah masih belum maksimal dalam memerankan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan.

Untuk itu, terhadap sistem pendidikan di Indonesia saat ini perlu ditambahkan dengan sejumlah perbaikan atau penyesuaian untuk membuatnya mampu melahirkan generasi-generasi yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan trampil serta sukses.¹⁸ Sebagai bangsa harus bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki sistem pendidikan untuk melahirkan generasi masa depan yang bersumber daya manusia yang handal. Kenapa demikian, oleh karena situasi yang akan datang tentunya tidak akan sama dengan situasi yang terdapat seperti hari ini. Merupakan kewajiban para pemegang otoritas hari ini, untuk menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga generasi muda sekarang ini dengan pengetahuan yang relevan, keterampilan yang memadai dan watak serta karakter yang dapat diandalkan, agar timbul barisan pengelola masyarakat dan bangsa yang mampu menjawab tantangan – tantangan yang beraneka ragam secara tepat dan

¹⁸Sasaran pendidikan Nasional menurut GBHN adalah peningkatan ketaqwaan, kecerdasan dan keterampilan. Lihat Munawir Syadzali, "Utama yang Berwawasan dan Tidak Romantis" dalam majalah Pesantren, Nomor 2 Vol-IV, 1987, h.29

cepat. Untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menuju kearah yang lebih ideal.

Persolan lain yang dihadapi oleh sistem pendidikan nasional dalam menghadapi masa depan ini adalah perluasan sistem, yang menambah daya tampung sistem, sehingga sistem pendidikan Indonesia tidak hanya mampu melayani anak-anak usia sekolah melalui sistem pendidikan formal saja, melainkan juga mampu melayani masyarakat luas melalui sistem pendidikan non-formal.

Mencernati pemikiran yang dipaparkan di atas, sekurang-kurangnya ada dua *trem* pendidikan nasional yang perlu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan, yaitu : (a) peremajaan sistem pendidikan formal yang ada dewasa ini, dan (b) pengembangan sistem non formal.¹⁹

Seperti dijelaskan Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ... Mutu manusia yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia antara lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Al-Qur'an telah menginformasikan secara gamblang bahwa ada dua bentuk kualitas manusia, yaitu manusia yang *ahsan at-taqwim*, yaitu kualitas terbaik, baik fisik maupun psikis, dan *asfala safilin*, yaitu kualitas terendah (QS. al-Tin : 5-6). Maka setiap manusia berpeluang untuk menjadi salah satu dari dua kondisi tersebut, namun melalui petunjuk-petunjuk-Nya, seseorang akan

¹⁹Mochtar Bukhori, *op.cit*, h.241

mencapai ketinggian *ahsan at-taqwim*, yaitu manusia yang berkualitas sesuai dengan asal mula kejadiannya, ia mencapai tingkat yang tertinggi dan keberuntungan dengan hidupnya mendapatkan berkah dan ridha-Nya.

Keyakinan dan keimanan yang dimiliki seseorang merupakan potensi rohani atau fitrah manusia yang perlu diaktualisasikan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus, sehingga menghasilkan prestasi rohani dalam bentuk eksisnya iman dan taqwa dalam diri seseorang. Potensi iman dan taqwa sangat perlu dikembangkan dan ditingkatkan terus menerus sampai akhir hayat, baik melalui proses belajar mengajar, membaca buku-buku, menelaah fenomena-fenomena alam yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Tuhan di alam semesta ini, penelitian, eksperimen, diskusi, dialog dan berbagai cara lain, begitu juga melalui *taqarrub* atau upaya pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah yang difardhukan, seperti shalat, puasa, zakat, zikir dan membaca serta memahami al-Qur'an. Nilai dan tingkat kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan dengan nilai-nilai ketaqwaannya.

Dengan demikian upaya pengembangan konsep iman dan taqwa akan dapat menghasilkan nilai-nilai positif yang berupa :

1. Sikap rasional kritis, kreatif, mandiri, bebas dan terbuka.
2. Sikap rasional empirik, obyektif, matematis.
3. Nilai-nilai amanah dan tanggung jawab individu dan sosial.
4. Sikap sabar, telaten, toleran serta solidaritas kemanusiaan dan solidaritas terhadap alam sekitar.

Makanya iman dan taqwa sebagai arah pengembangan pendidikan Islam, adalah merupakan tujuan akhir pendidikan Islam yang berwujud penyerahan diri atau ketundukan yang mutlak kepada Allah terhap individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya.

Di sisi lain yang tidak boleh tidak, yang harus dibenahi dalam konteks perbaikan dan pengembangan dunia pendidikan adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan haruslah memberikan perioritas utama dan perhatian penuh pada pendidikan, baik dari segi anggaran dana ataupun mengarahkan agar pendidikan tidak terlepas dari dasar-dasar moral dan religius. Pemerintah semestinyalah mengupayakan agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati pendidikan yang baik dengan biaya yang terjangkau. Tentu juga semua pihak harus terlibat dan bersinergi antara pendidikan formal dengan pendidikan keluarga dan masyarakat sehingga timbul lingkungan nuansa pendidikan yang harmonis.

E. Penutup

Memperhatikan pembahasan di atas, maka posisi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan posisi sangat strategis untuk pembinaan generasi muda dan remaja Islam. Sehingga dengan posisi tersebut, tentunya tujuan pendidikan nasional, yaitunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memilki rasa tanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan akan dapat diwujudkan.

Pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional sebenarnya konsekwensi logis dari keberadaan Islam sebagai bagian dari kemajemukan agama yang diakui dalam suatu negara. Tentunya pendidikan nasional dewasa ini diharapkan mampu untuk mengadakan peremajaan sistem pendidikan formal yang ada dewasa ini dan pengembangan sistem non formal.

Sistem pendidikan Islam di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sistem pendidikan non formal yang dapat memenuhi kebutuhan, baik bagi umat Islam sendiri pada khususnya, maupun bagi bangsa Indonesia umumnya. Hal ini dengan cara membekali remaja dengan pengetahuan yang relevan, keterampilan yang memadai, watak serta karakter yang dapat diandalkan, sehingga akan melahirkan generasi penerus yang beriman dan berakhlak mulia, sukses dan cerdas yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri.

Daftar Kepustakaan

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

- Ashraf, Ali, *Harison Baru Pendidikan Islam*, terj. Sori Siregar, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1989), h.89
- Barnadib, Imam, *Dasar Filsafat Sistem Pendidikan Nasional dalam Pemikiran tentang Pendidikan Baru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), h.144-145
- Bukhori, Muchtar, *Spektrum Problema Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), h.124
- Brubacher, John S, *Modern Philosophies of Education* (New York : McGraw-Hill Book Company, Inc,1950), h.127-128
- Depdiknas, *Undang-undang Nomor 20 tahun 2003* (Jakarta : Biro Humas, 2003)
- HM, Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h.3-4
- Khan, M,S, *Humanisme and Islamic Education*, dalam Muslim Vol, IV Nomor 3, spring 1987, h.26-27
- Muhaimin, DKK, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : Higenda Karya, 1993), h.136
- Raharjo, Mudjia, *Quo Vadis Pendidikan Islam Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Ilmu Pengetahuan*, (Malang : Cendekia Paramulia, 2000),h.54
- Sajjad, Syed Husein, *Crisis in Moslem Education*, (Jeddah : King Abdul Aziz University,1979), h. 51
- Saleh, Abdurrahman, Abdullah, *Educational Theory Quranic Out Look*, (Mèkkah: Ummul Qura University, 1982), h.1
- Zuhairini, DKK, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara,1992),h.157